



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN

2016 - 2021



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 merupakan pedoman pelaksanaan kinerja bagi segenap jajaran dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016 - 2021.

Materi dan penjelasan yang disusun merupakan Analisis dari Data dan Fakta yang ada secara partisipatif oleh segenap karyawan dilingkungan Dinas Pendidikan, kiranya menjadi komitmen bersama untuk melaksanakan secara konsisten dan konsekuen serta bertanggungjawab.

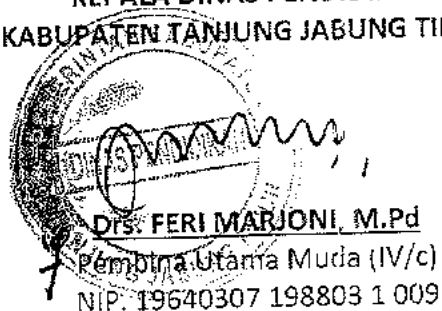
Selain itu dengan renstra ini diharapkan dapat diketahui tingkat keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penanggung jawab teknis sekaligus sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kepada Bupati dan publik.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 dirinci dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja tahunan adalah bentuk program dan kegiatan sebagai dasar dan acuan dalam pengajuan anggaran.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi usaha dan langkah kita dalam membangun masa depan yang lebih maju dan sukses.

Muara Sabak, 15 November 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



Drs. FERI MARJONI, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640307 198803 1 009

DAFTAR ISI

		1
KATA PENGANTAR		2
DAFTAR ISI		3
BAB I	PENDAHULUAN	3
	1.1 Latar Belakang	4
	1.2 Landasan Hukum	6
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penyusunan Renstra	
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN	10
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	10
	2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan	16
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan	26
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan	31
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	36
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	36
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	38
	3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi	39
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	42
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN	43
	4.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan	43
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	45
	4.3 Strategi dan Arah Kebijakan	48
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	49
	Penyajian menggunakan Tabel	
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	50
	Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel	
BAB VII	PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan telah disahkannya RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu SKPD harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan.

Ketentuan setiap SKPD harus membuat Renstra tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra dimaksud memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan mampu menjawab tuntutan di lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran). Strategi memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Selain Inpres tersebut diatas, ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman teknis yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Pendidikan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Dalam rangka membangun pendidikan yang lebih berkualitas, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku penanggung jawab utama teknis penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bidang pendidikan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Program Pembangunan Pendidikan tahun 2016 - 2021 sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran penyelenggara pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 didasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tahun 2003);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

18. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 sebagai landasan/pedoman penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan penganggarannya, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

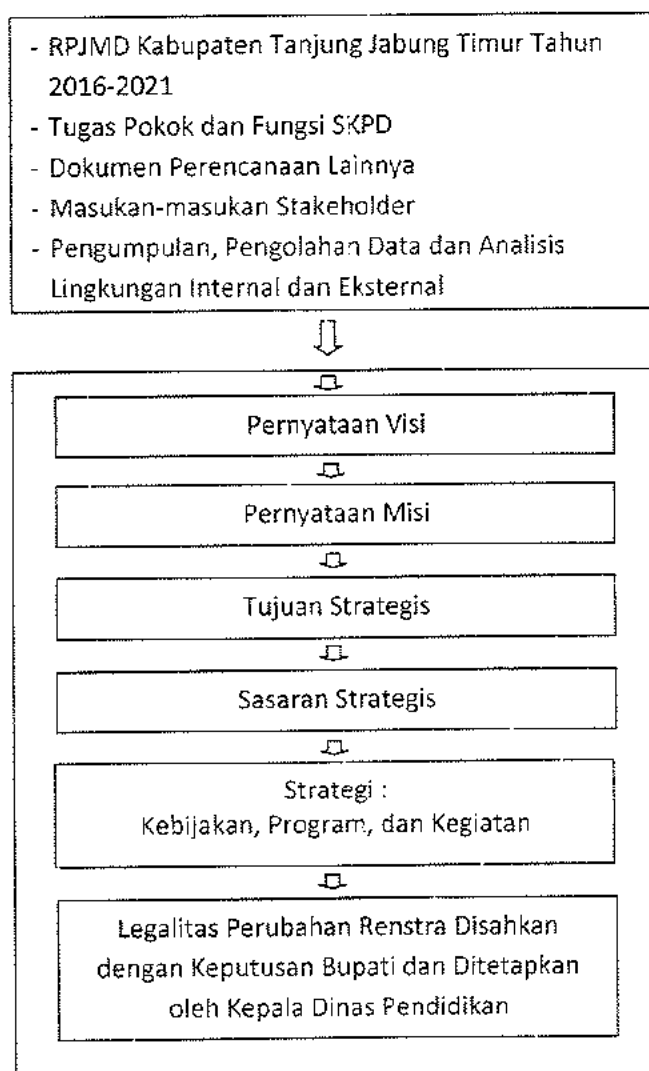
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders Dinas Pendidikan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan renstra.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021. Legalisasi Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Alur fikir penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 disajikan dalam gambar 1.2

Gambar 1.2 Alur Fikir Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan



Sedangkan sistematika penyusunan perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD**
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
 - 2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih;
 - 3.3 Telaahan Renstra Kemendiknas
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN**
- 4.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan
 - 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
 - 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF**
Penyajian menggunakan Tabel
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel
- BAB VII : PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

a. Tugas :

Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan;
2. Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
3. Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama;
4. Penyelenggaraan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendidikan;
6. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pendidikan;
7. Pelaksanaan Fungsi Lain yang terkait bidang pendidikan yang diberikan oleh Bupati.

2. SEKRETARIAT

a. Tugas :

Memberikan Pelayanan Teknis dan Administratif kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran;
2. Pengelolaan Urusan Kepegawaian;
3. Pengelolaan Urusan Keuangan;
4. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha;
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan; dan
6. Pengelolaan Urusan Umum.

3. BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

a. Tugas :

Melaksanakan Penyiapan Koordinasi, Fasilitasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan Penetapan dan Penilaian Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat;
2. Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat;
3. Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat;
4. Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian, Penataan, serta Penutupan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat.

4. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

a. Tugas :

Melaksanakan Penyiapan Koordinasi, Fasilitasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Dasar.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan Penetapan dan Penilaian Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar;
2. Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar;
4. Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian, Penataan, serta Penutupan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar.

5. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

a. Tugas :

Melaksanakan Penyiapan Koordinasi, Fasilitasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan Penetapan dan Penilaian Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
2. Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
3. Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peserta Didik Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
4. Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian, Penataan, serta Penutupan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

6. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Tugas :

Melaksanakan Penyiapan Koordinasi, Fasilitasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

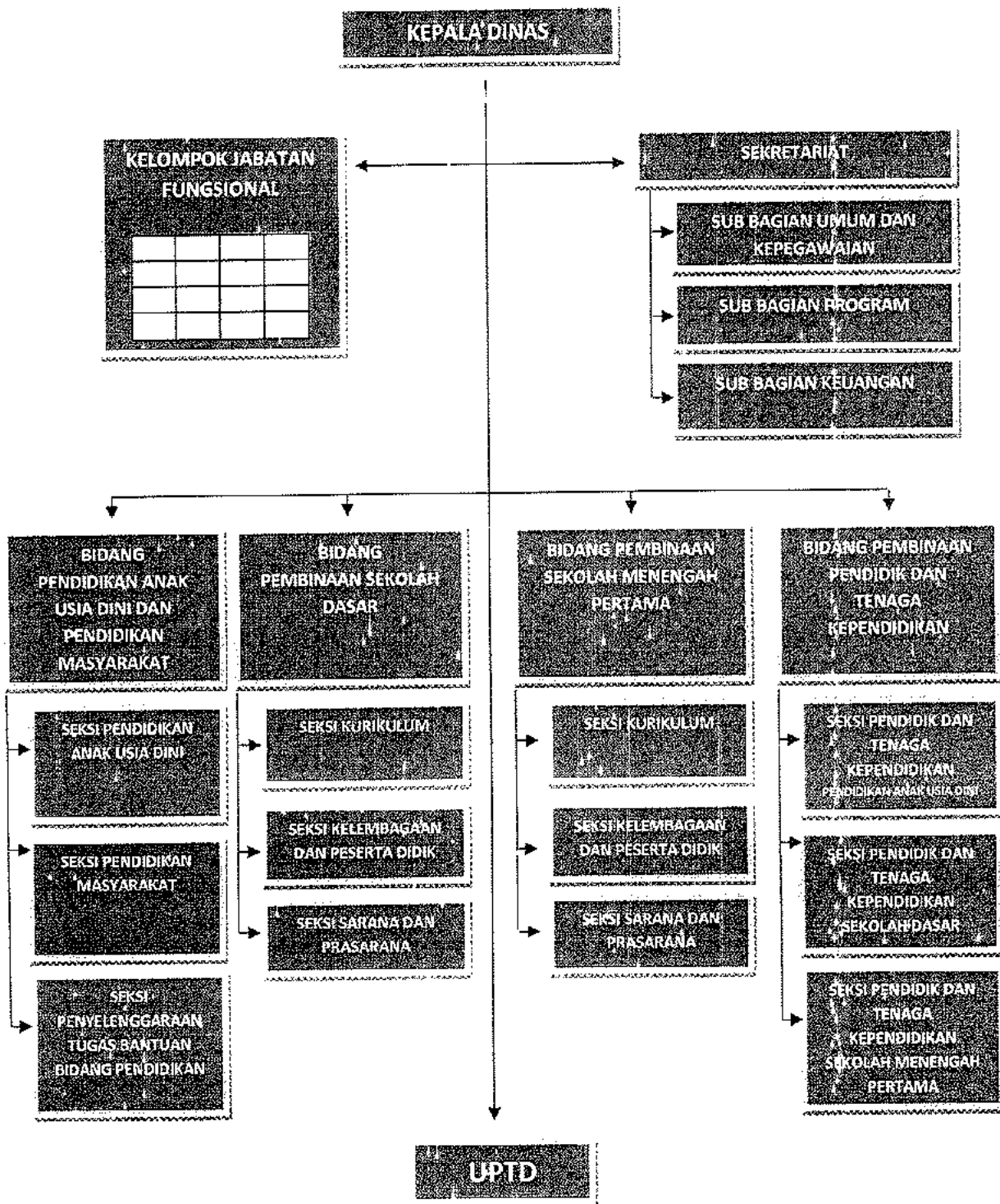
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Perangkat Daerah sebagai Unsur Pelaksana Penyelenggara Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bag, 12 (dua belas) Seksi.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

a.	Kepala Dinas
b.	Sekretariat :
	1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	2. Sub Bagian Program
	3. Sub Bagian Keuangan
c.	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat :
	1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
	2. Seksi Pendidikan Masyarakat
	3. Seksi Penyelenggaraan Tugas Bantuan Bidang Pendidikan
d.	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar :
	1. Seksi Kurikulum
	2. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
	3. Seksi Sarana dan Prasarana
e.	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama :
	1. Seksi Kurikulum
	2. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
	3. Seksi Sarana dan Prasarana
f.	Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
	1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
	2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
	3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
g.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
h.	Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



2.2 SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN

A. Kondisi Umum Pegawai

Berikut tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Dinas pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel 1

Keadaan Pegawai

NO	STATUS	JUMLAH	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN			GOLONGAN					
			L	P	SLTP	SLTA	DIPLOMA	S1	S2	I	II	III	IV
1	PNS	44	30	14	1	16	3	22	2	1	18	20	5
2	NON PNS	20	13	7	1	8	2	9	-	-	-	-	-
JUMLAH		64	43	21	2	24	5	31	2	1	18	20	5

Tabel 2

Pejabat Eselon

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	ESELON	JUMLAH
1	II-b	1
2	III-a	1
3	III-b	4
4	IV-a	15
5	IV-b	-
6	V-a	-
JUMLAH		21

Tabel 3

Pejabat Eselon

UPTD Pendidikan Kecamatan

NO	ESELON	JUMLAH
1	IV-a	11
2	IV-b	7
3	V-a	-
4	V-b	-
JUMLAH		18

B. Gambaran Umum Kondisi Pendidikan

Tabel 4

Perkembangan Lembaga Satuan Pendidikan (Sekolah)

No	Jenjang	Status	Tahun			
			2010	2011	2012	2013
1	TK	Negeri	13	13	17	17
		Swasta	13	12	27	26
		Jumlah	26	25	44	43
2	SD	Negeri	205	205	204	204
		Swasta	2	2	2	2
		Jumlah	207	207	206	206
3	SMP	Negeri	43	43	45	45
		Swasta	0	0	0	0
		Jumlah	43	43	45	45
4	SMA	Negeri	10	10	10	10
		Swasta	3	3	2	2
		Jumlah	13	13	12	12
5	SMK	Negeri	6	6	6	6
		Swasta	1	1	1	1
		Jumlah	7	7	7	7

Tabel 5

Perkembangan Jumlah Siswa

NO	JENJANG SEKOLAH	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	TK/PAUD	766	2.074	1.102	998	1.022
2	SD	25.860	12.886	24.713	24.389	24.436
3	SMP	6.880	6.885	7.113	7.214	6.733
4	SMA		3.805	3.843	3.876	4.125
5	SMK	894	1.893	1.243	1.361	1.555
JUMLAH						

Tabel 6

PERKEMBANGAN DANA BOS (PUSAT) SD DAN SMP

NO	JENJANG	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD	10.325.176.000	10.248.158.000	3.474.345.000	14.389.220.000	14.397.920.000	20.246.400.000
2	SMP	4.058.970.000	4.043.010.000	1.118.605.000	1.224.217.500	5.058.750.000	7.216.000.000
JUMLAH		14.384.146.000	14.291.168.000	4.592.950.000	15.613.437.500	19.456.670.000	27.462.400.000

Tabel 7

PERKEMBANGAN DANA BOMM SMA DAN SMK						
NO	JENJANG	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA/SMK	2.035.560.000	2.006.440.000	2.536.090.000	2.048.824.894	2.560.543.000
	JUMLAH	2.035.560.000	2.006.440.000	2.536.090.000	2.048.824.894	2.560.543.000

Tabel 8

PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (PERKEMBANGAN KELULUSAN)						
NO	INDIKATOR POKOK	2011	2012	2013	2014	2015
1	TINGKAT KELULUSAN SD	99,97%	100%	100%	100%	99,60%
2	TINGKAT KELULUSAN SMP	99,93%	99,90%	99,83%	100%	99,05%
3	TINGKAT KELULUSAN SMA/SMK	99,77%	98,80%	98,84%	99,01%	100%

Tabel 9

PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN (APK DAN APM) PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES						
No	Indikator Kunci Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	APK SD/MI/SDLB/Paket A	116,00%	112,00%	110,00%	110,53%	112,87%
2	APM SDM/MI/SDLB/Paket A	96,95%	96,97%	97,06%	97,07%	90,69%
3	APK SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	84,02%	84,42%	87,38%	97,61%	92,27%
4	APM SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	78,25%	78,45%	78,74%	83,09%	90,69%
5	APK SMA/SMK/ MA/SMALB/Paket C	64,09%	65,86%	65,04%	86,59%	90,63%
6	APM SMA/SMK/ MA/SMALB/Paket C	58,09%	58,91%	58,92%	62,29%	62,41%

APK = Angka Partisipasi Kasar
APM = Angka Partisipasi Murni

Tabel 10

Perkembangan Jumlah Guru Menurut Status Pegawai

No	JENJANG SEKOLAH	STATUS	TAHUN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	PAUD	PNS					
		NON PNS					
		JUMLAH					
2	TK	PNS	14	27	25	16	21
		NON PNS	67	107	113	90	105
		JUMLAH	81	134	138	106	126
3	SD	PNS	1.401	13.344	1310	1283	1328
		NON PNS	583	570	492	461	443
		JUMLAH	1.984	13.914	1802	1744	1771
4	SMP	PNS	437	450	432	430	414
		NON PNS	165	170	151	145	118
		JUMLAH	602	620	583	575	532
5	SMA	PNS	194	202	203	204	215
		NON PNS	106	103	85	87	84
		JUMLAH	300	305	288	291	299
6	SMK	PNS	63	84	92	93	102
		NON PNS	44	63	59	54	61
		JUMLAH	107	147	151	147	163
JUMLAH GURU PNS			3.074	15.120	2962	2863	2891

Tabel 11

JUMLAH GURU DAN ROMBEL / RUANG KELAS

No	TENAGA PENDIDIK	JUMLAH	JUMLAH KELAS	KEKURANGAN
1	GURU KELAS SD	1040	1445	-405
2	GURU AGAMA SD	156	156	0
3	GURU PENJASKES SD	82	2	80
4	GURU B. INGGRIS SD	6	6	0
5	GURU MP SMP	466	290	176
6	GURU MP SMA/SMK	309	56	253
CATATAN SD				
1. SEBARAN GURU BELUM MERATA				

Tabel 12

**JUMLAH DAN SEBARAN GURU SD
BERDASARKAN
GURU KELAS DAN MATA PELAJARAN**

NO	MATA PELAJARAN	BUTUH	ADA	KURANG	LEBIH
1	GURU KELAS	1.445	1.051	394	0
2	AGAMA ISLAM	206	157	49	0
3	BAHASA INGGRIS	0	0	0	0
4	PENDIDIKAN JASMANI	206	51	155	0
JUMLAH		1.857	1.259	598	0

CATATAN

PERSEBARAN GURU KELAS DAN MATA PELAJARAN
BELUM MERATA

Tabel 13

JUMLAH DAN SEBARAN GURU SMP BERDASARKAN MATA PELAJARAN

NO	MATA PELAJARAN	BUTUH	ADA	KURANG	LEBIH
1	PPKN	24	35	0	11
2	AGAMA ISLAM	24	37	0	13
3	BAHASA INDONESIA	48	53	0	5
4	BAHASA INGGRIS	48	64	0	16
5	PENDIDIKAN JASMANI	24	19	5	0
6	MATEMATIKA	48	58	0	10
7	IPA	48	86	0	38
8	IPS	48	52	0	4
9	KERTAKES	24	4	20	0
10	BP/BK	0	0	0	0
11	TIK	24	7	17	0
JUMLAH		360	415	42	97

CATATAN

PERSEBARAN GURU MATA PELAJARAN BELUM MERATA

Tabel 14

JUMLAH DAN SEBARAN GURU SMA DAN SMK BERDASARKAN MATA PELAJARAN

NO	MATA PELAJARAN	BUTUH	ADA	KURANG	LEBIH
1	PPKN	11	8	3	0
2	AGAMA ISLAM	11	12	0	1
3	BAHASA INDONESIA	28	20	8	0
4	BAHASA INGGRIS	28	22	6	0
5	SEJARAH	24	21	3	0
6	PENDIDIKAN JASMANI	11	9	2	0
7	MATEMATIKA	17	21	0	4
8	FISIKA	11	12	0	1
10	BIOLOGI	11	19	0	8
11	KIMIA	11	23	0	12
12	EKONOMI	11	15	0	4
13	SOSIOLOGO	11	11	0	0
14	GEOGRAFI	6	13	0	7
15	SENI BUDAYA	11	2	9	0
16	TIK	11	4	7	0
17	TATA NEGARA	5	0	5	0
18	ANTROPOLOGI	5	0	5	0
19	SASTRA INDONESIA	12	0	12	0
20	NPL	12	0	12	0
21	BUDI DAYA PERIKANAN	7	3	4	0
22	AGRIBISNIS PERIKANAN	2	4	0	2
23	TATA BUSANA	9	4	5	0
24	TATA BOGA	5	2	3	0
25	KKPI	9	0	9	0
26	OTOMOTIP	2	3	0	1
27	TEKNIK MESIN KAPAL	2	2	0	0
28	PERTANIAN	9	4	5	0
29	PERTERNAKAN	9	1	8	0

Tabel 15

GURU BERSERTIFIKASI

NO	JENJANG	TAHUN SERTIFIKASI					
		BERDASARKAN SK DIRJEN PMPTK					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	PAUD/TK	2	2	3	5	5	7
2	SD	317	556	634	825	1064	1063
3	SMP	152	9	98	110	162	165
4	SMA	59	70	56	56	64	78
5	SMK	13	20	30	30	21	21
6	PENGAWAS	21	21	21	21	21	21
JUMLAH		564	678	842	1047	1337	1355

Tabel 16

**MENURUT KUALIFIKASI IJAZAH
PADA TAHUN 2015**

No.	Tempat Tugas	Jumlah Menurut Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		SPG	D2	S1/D4	S2/S3	
1	TK	7	13	10	-	30
2	SD	174	326	988	1	1.489
3	SMP	7	23	431	4	465
4	SMA/SMK	-	2	295	11	308
JUMLAH		188	364	1.724	16	2.292

Tabel 17

PERKEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH

NO	SARANA/PRASARANA	2011	2012	2013	2014	2015	JUMLAH
1	RUANG UKS SD	7	45	57	63	74	246
2	RUANG PERPUSTAKAAN SD	5	96	94	91	98	384
3	RKB SD	4	6	9	12	7	38
4	REHAB SD	19	15	26	27	10	97
5	MEUBELER SD	1.730	1.560	2.740	36	1.662	7.728
6	REHAB RUMAH DINAS	25	33	26	27	14	125
7	RUANG UKS SMP	-	22	13	12	17	64
8	RUANG PERPUSTAKAAN SMP	6	35	26	27	26	120
9	RKB SMP	3	-	3	-	-	6
10	LABORATORIUM SMP	-	38	40	36	43	157
11	MEUBELER SMP	1.535	480	1.280	8	642	3.945
12	REHAB RUMAH DINAS SMP	4	3	-	-	-	7
13	REHAB SMP / SMA DAN SMK	2	-	6	-	-	8
14	RKB SMA / SMK	-	3	1	-	-	4
15	MEUBELER SMA / SMK	435	13	1.000	-	1.800	3.248

Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah

Tabel 18

Perkembangan Lembaga Kursus

NO	JUMLAH	2011	2012	TAHUN 2013	2014	2015
1	LEMBAGA	10	10	17	21	29
2	TUTOR	10	23	24	3	47
3	WARGA BELAJAR	105	196	476	758	818

Tabel 19

Perkembangan Sanggar Belajar (SKB)

NO	KELOMPOK BELAJAR	2011	2012	TAHUN 2013	2014	2015
1	LEMBAGA	1	1	1	1	1
2	TUTOR	6	17	19	33	44
3	WARGA BELAJAR	20	195	150	265	227

Tabel 20

Perkembangan Kelompok Belajar (KB)

NO	KELOMPOK BELAJAR	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	PAKET A	15	4	2	6	7
2	TUTOR	30	8	4	12	14
3	WARGA BELAJAR	210	85	39	127	148

Tabel 21

Perkembangan Kelompok Belajar (KB)

NO	KELOMPOK BELAJAR	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	PAKET B	39	22	10	15	22
2	TUTOR	234	132	60	90	132
3	WARGA BELAJAR	806	393	246	448	564

Tabel 22

Perkembangan Kelompok Belajar (KB)

NO	KELOMPOK BELAJAR	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	PAKET C	20	21	16	25	24
2	TUTOR	100	126	6	175	168
3	WARGA BELAJAR	546	574	465	759	886

Tabel 23

Perkembangan Kelompok Bermain

NO	KELOMPOK BELAJAR	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	LEMBAGA	223	225	229		305
2	TUTOR	446	280	790		915
3	WARGA BELAJAR	8.036	17.659	6.801		8.326

Tabel 24

Perkembangan TPA

NO	TPA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	LEMBAGA	2	2	1	3	5
2	TUTOR	4	4	2	6	10
3	WARGA BELAJAR	22	25	12	33	12

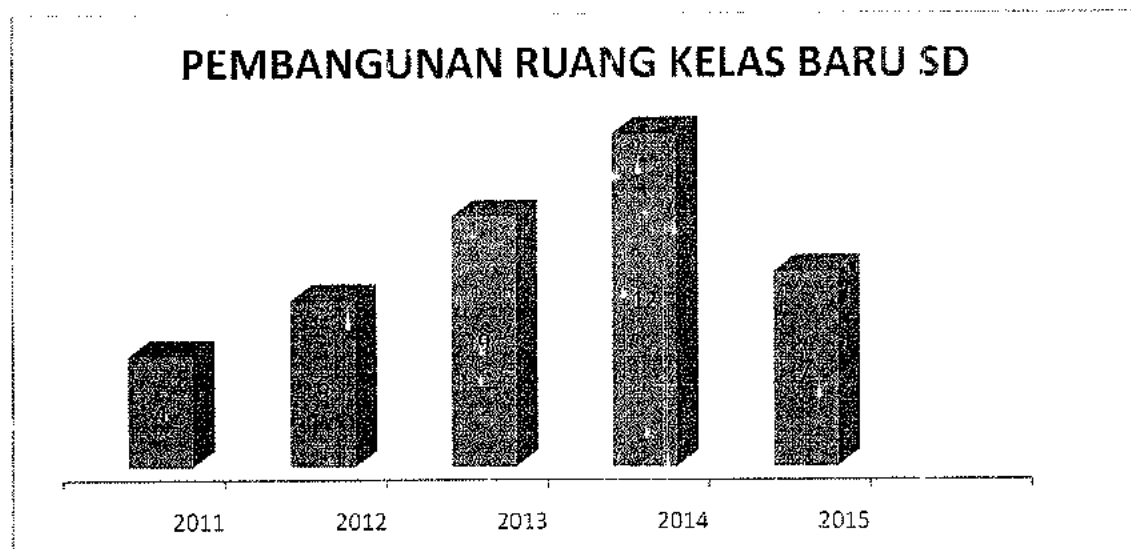
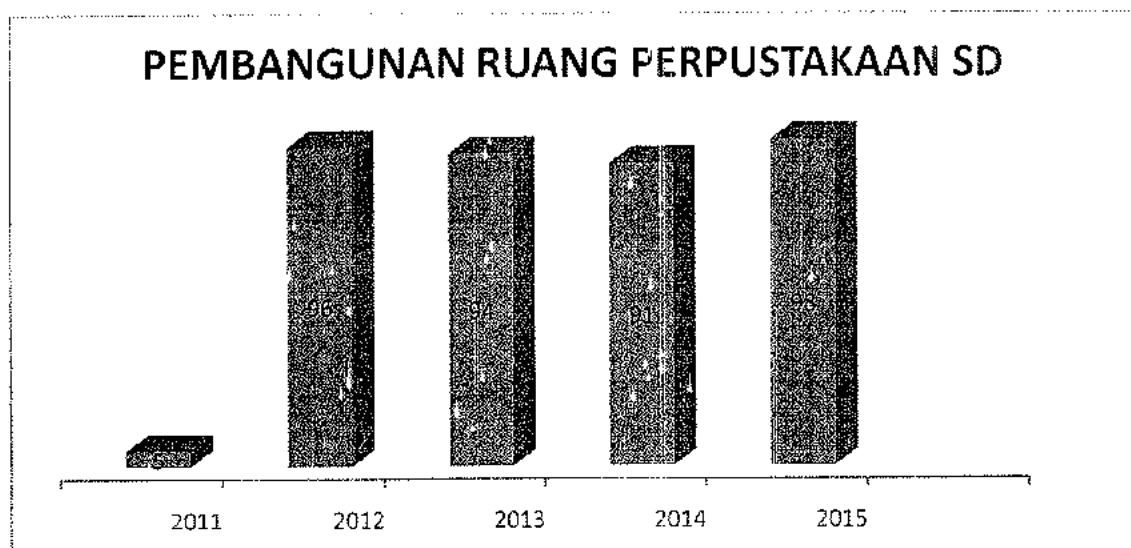
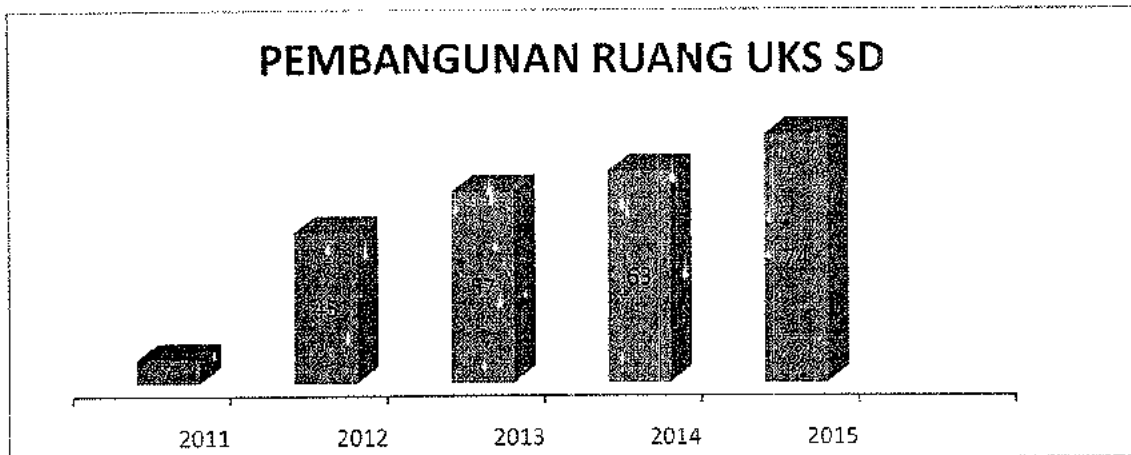
Tabel 25

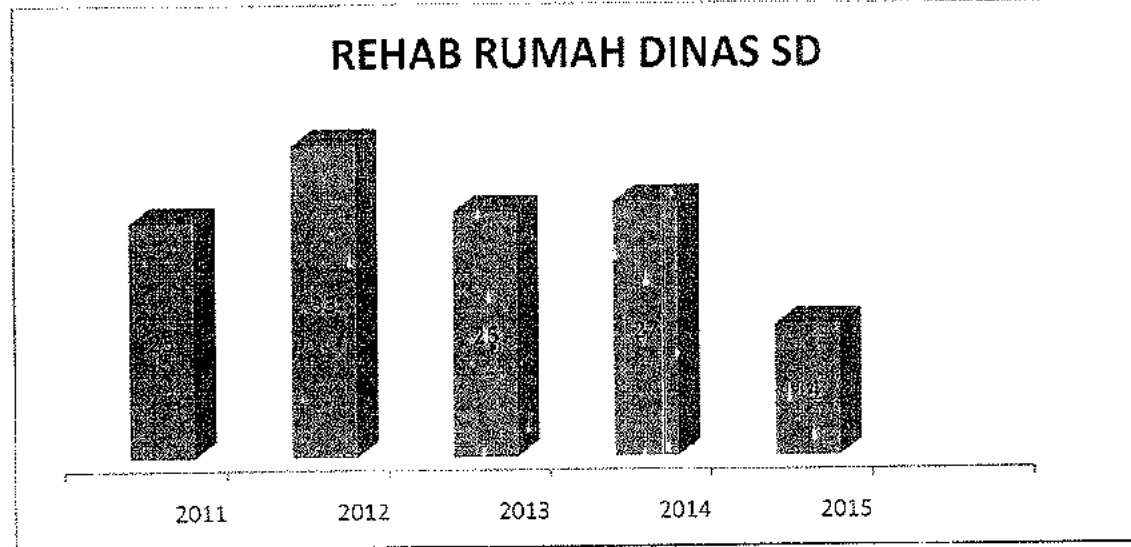
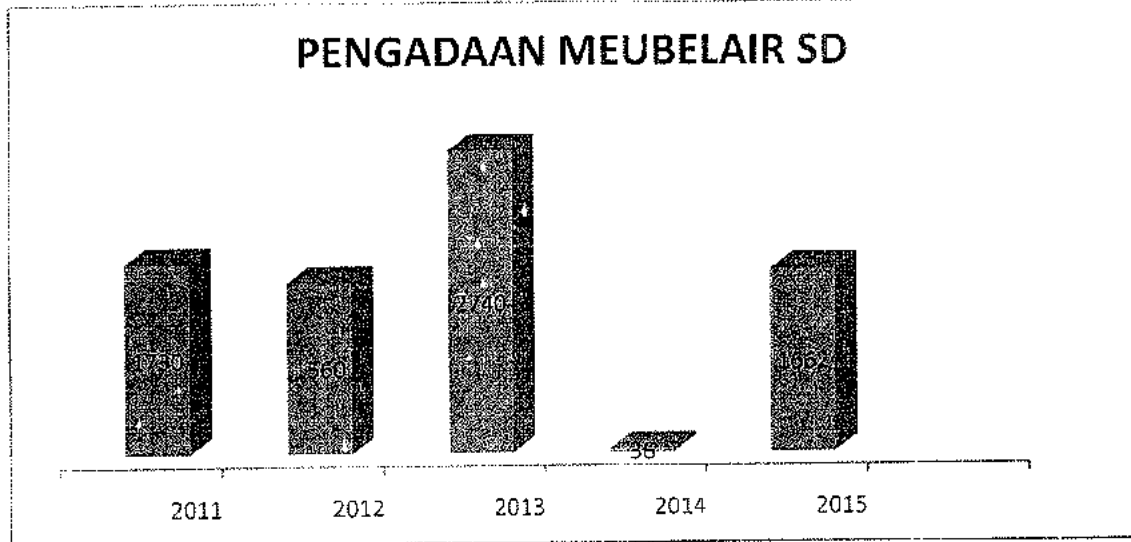
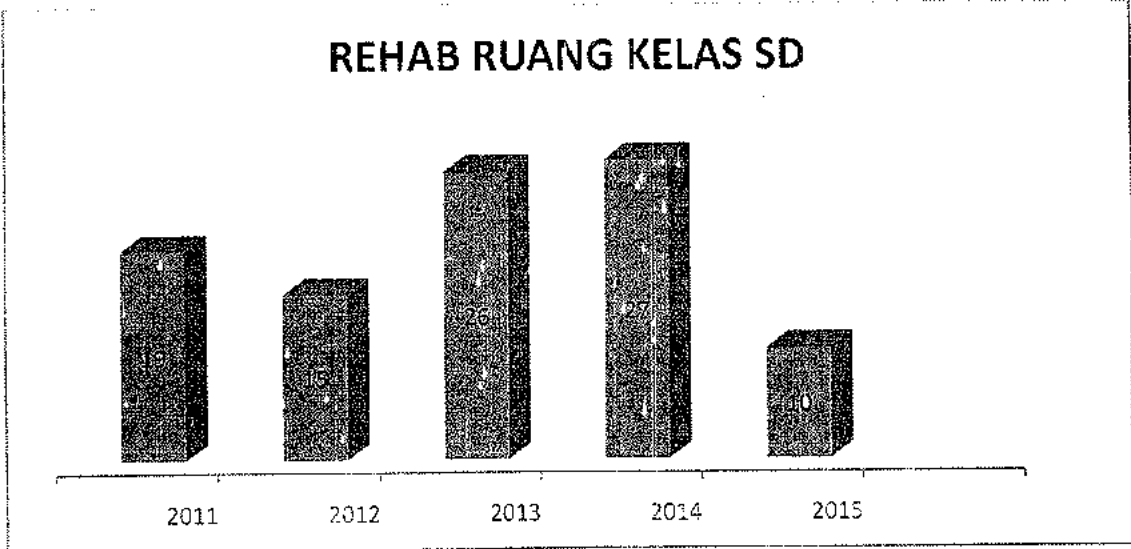
Perkembangan Anggaran Pendidikan

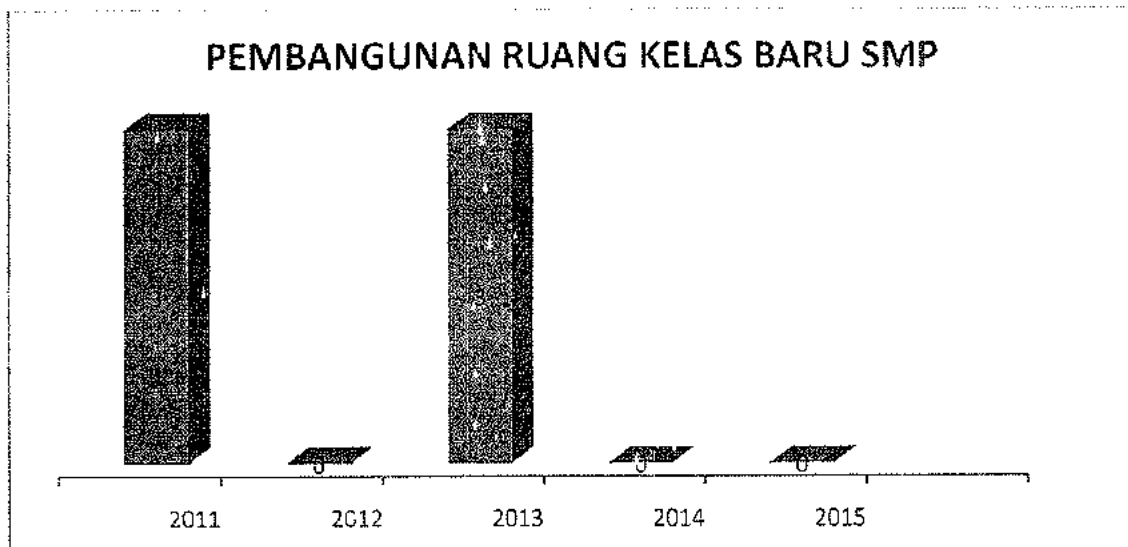
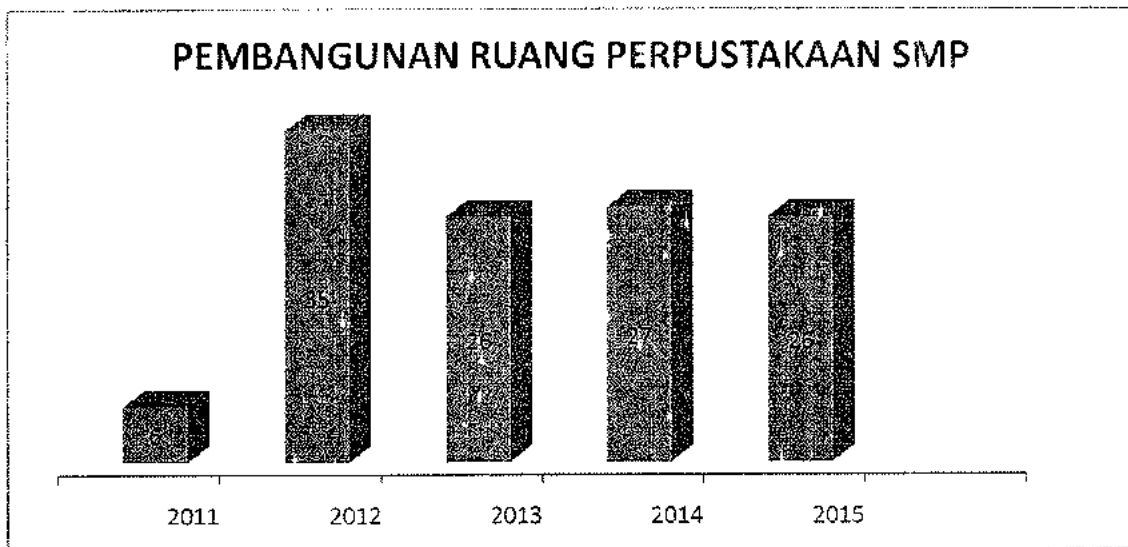
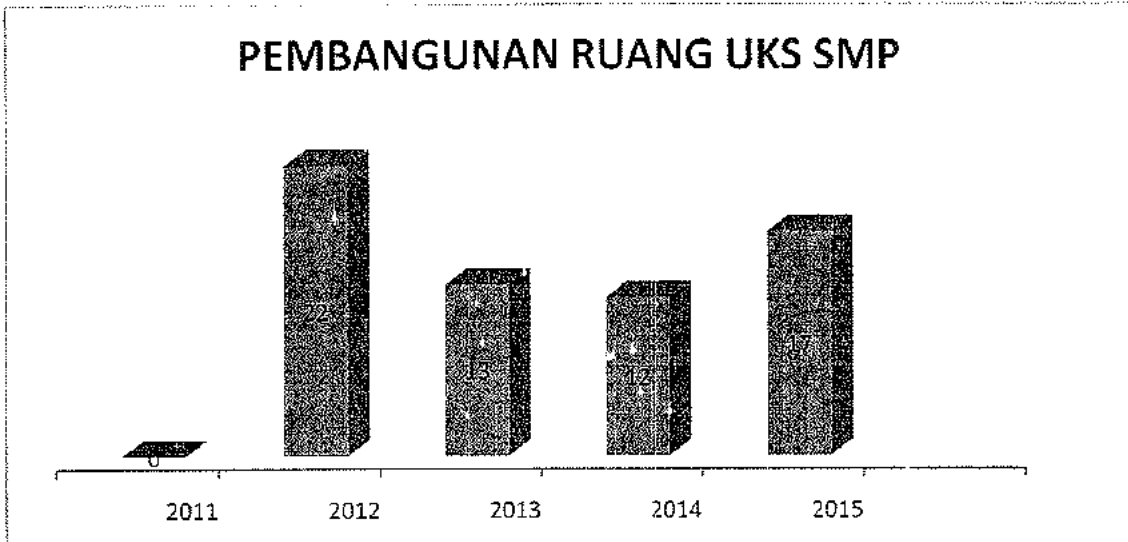
NO	TAHUN	APBD DINAS PENDIDIKAN
1	2010	41.486.700.500,00
2	2011	43.284.547.000,00
3	2012	43.765.379.000,00
4	2013	53.909.788.325,00
5	2014	47.781.042.402,30
6	2015	31.705.974.410,00

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

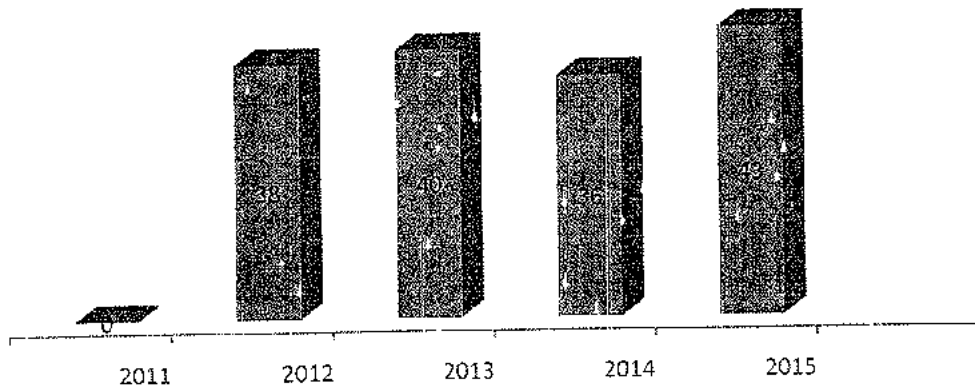
Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah sebagai berikut :



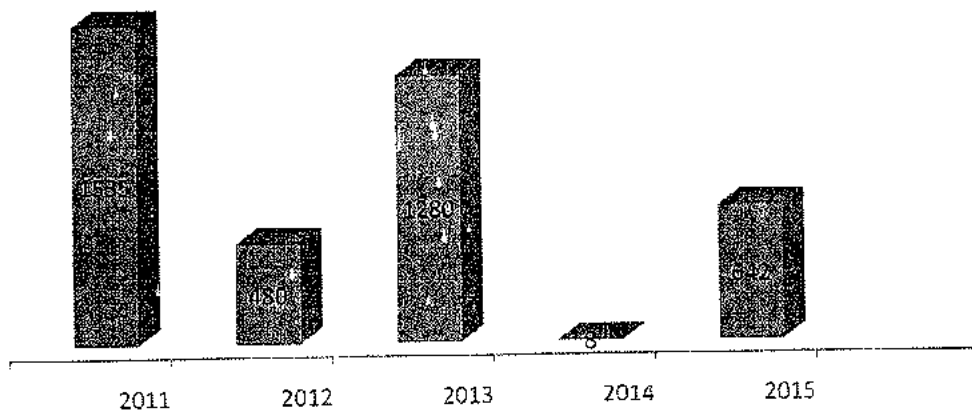




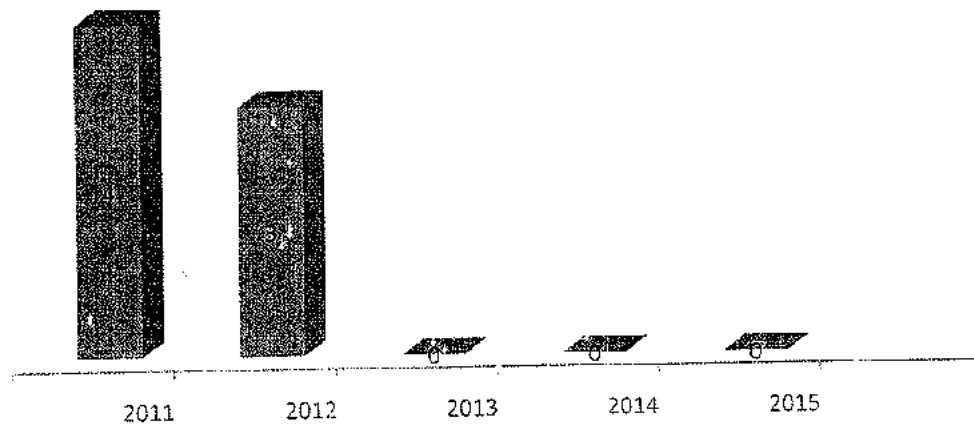
PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM SMP

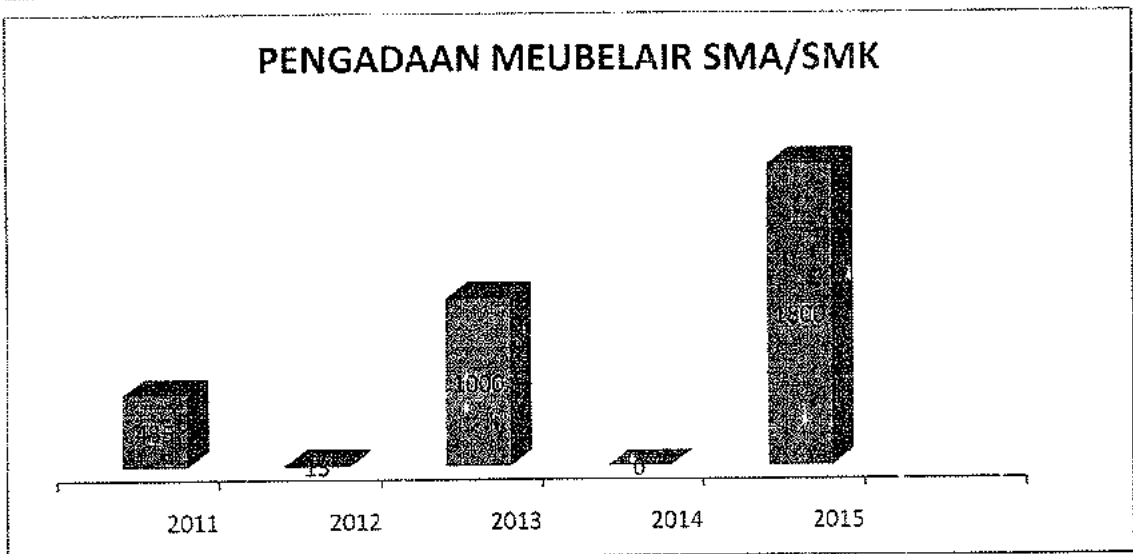
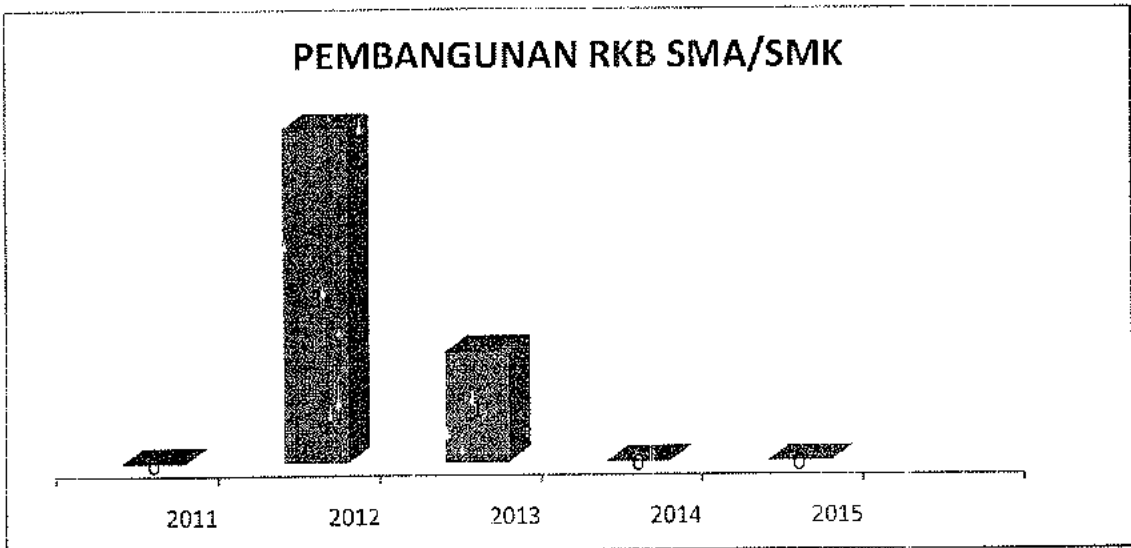
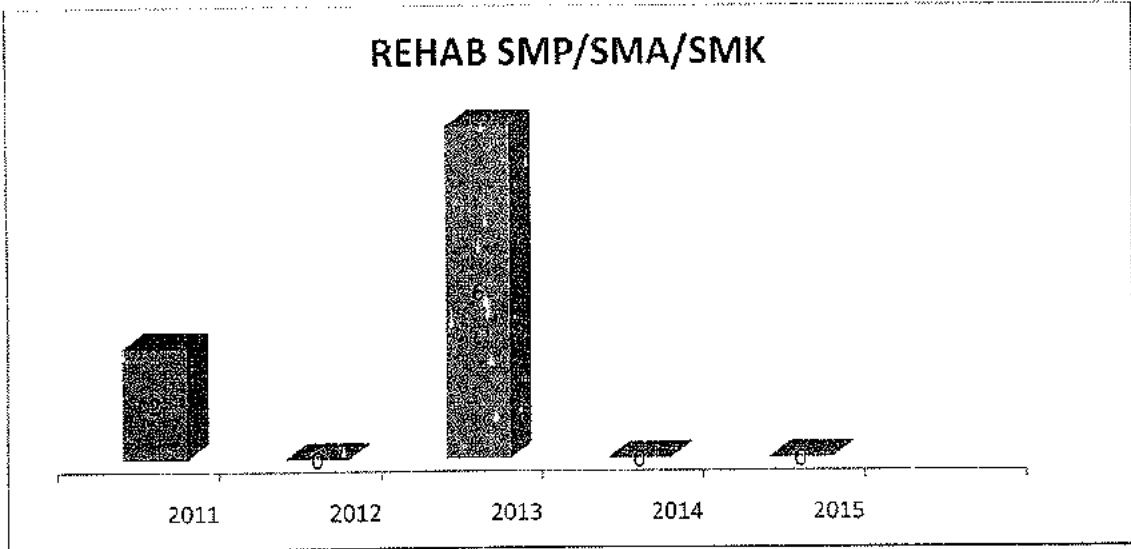


PENGADAAN MEUBELAIR SMP



REHAB RUMAH DINAS SMP





2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats), yang meliputi bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN/STRENGTHS (S)

- a. Memiliki jumlah pegawai yang cukup memadai.
- b. Kesadaran tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- c. Kerjasama antar tenaga kependidikan baik.
- d. Keberhasilan program wajib belajar 9 tahun.
- e. Potensi pelatih dan atlet olah raga.
- f. Kemampuan daya tampung peserta didik yang memadai.
- g. Kemampuan kinerja organisasi yang mantap.
- h. Penyebaran lembaga pendidikan merata.
- i. Memiliki pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang memadai.
- j. Memiliki pegawai yang berkinerja baik.
- k. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
- l. Ruang kerja yang luas dan nyaman.
- m. Mudah terjangkau dan strategis.
- n. Memiliki mushola sendiri.
- o. Mempunyai pegawai yang menguasai teknologi informasi yang cukup.
- p. Mempunyai system kerja yang baku.
- q. Sarana olah raga yang memadai.

KELEMAHAN/WEAKNESSES (W)

- a. Kualifikasi tenaga kependidikan masih ada yang tidak sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu.
- b. Masih kurangnya tenaga perpustakaan dan laboran untuk SMA/SMK.
- c. Masih ada guru SD yang berpendidikan SLTA sederajat.
- d. Masih ada guru SMP dan SMA/SMK yang berlatar belakang pendidikan D II dan D III.
- e. Masih kurangnya tenaga pengamanan (satpam), penjaga sekolah dan petugas kebersihan serta pelayanan sekolah.
- f. Pengetahuan dan keterampilan manajemen pendidikan belum maksimal.
- g. Sarana dan prasarana pendidikan terbatas.
- h. Unit pelaksanaan teknis pendidikan masih berdaya saing rendah.
- i. Penyelenggaraan pendidikan belum berjalan secara efisien dan efektif.
- j. Mutu pendidikan belum merata.
- k. Lulusan SMK (pendidikan keterampilan dan keahlian) belum memiliki relevansi dengan kebutuhan tenaga kerja.
- l. Masih terdapat pegawai yang memiliki dedikasi rendah.
- m. Keterbatasan sumber dan tenaga pendataan sehingga menghambat proses pembuatan rencana kerja.
- n. Sistem mekanisme kerja yang belum mantap.
- o. Sistem pembinaan SDM dan karir tenaga kependidikan belum baik.
- p. Masih terdapat pegawai yang belum memahami dan menjalankan sepenuhnya terhadap tugas, pokok, dan fungsinya dengan baik.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG/OPPORTUNITIES (O)

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai komitmen yang cukup tinggi dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan.
- b. Dukungan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam bidang pendidikan cukup tinggi.
- c. Adanya perhatian dan dukungan dari pemerintahan pusat.
- d. Dukungan dari dunia usaha dalam penyelenggaraan program magang untuk siswa SMK.
- e. Kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan sangat tinggi.
- f. Adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- g. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi yang dapat mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- h. Adanya kesempatan bersaing tamatan sekolah kejuruan di tingkat nasional dan internasional dalam dunia kerja.

ANCAMAN/THREATS (T)

- a. Adanya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas.
- b. Tuntutan kualitas outcome semakin tinggi.
- c. Adanya tantangan globalisasi.
- d. Sistem pengelolaan dan pembinaan tenaga kependidikan belum mengacu pada prestasi.
- e. Terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri baik daerah maupun nasional.
- f. Semakin banyaknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang (narkoba)
- g. Meningkatnya angka putus sekolah pada sekolah lanjutan.
- h. Meningkatnya angka kemiskinan.

Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambar di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. STRATEGI S-O

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan;
- c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- e. Lebih meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarfungsi yang ada di internal maupun eksternal;
- g. Meningkatkan kerjasama pembangunan pada sektor pendidikan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar wilayah perbatasan.

2. STRATEGI W-O

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan rekrutmen guru honor daerah;
- e. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- f. Meningkatkan pengembangan program keahlian sesuai dengan tuntutan dunia pendidikan baik secara kualitas maupun kuantitas.

3. STRATEGI S-T

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Menambah jumlah satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Menjalin berbagai kerjasama dengan stakeholder pendidikan;
- d. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu yang ada pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- e. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- f. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur pendidikan nonformal.

4. STRATEGI W-T

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF dan Tutor pada jalur pendidikan nonformal;
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan daya tampung sekolah;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal;
- f. Meningkatkan peran pengusaha dan stakeholder pendidikan dalam pembangunan pendidikan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB 2), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

1. Masih terdapat guru TK, SD, SMP, SMA/SMK yang belum berkualifikasi pendidikan S1;
2. Masih terdapat guru TK, SD, SMP, SMA/SMK yang belum sertifikasi;
3. Masih ditemukan kekurangan Sarana prasarana belajar siswa;
4. Masih terdapat ruang kelas belajar yang rusak;
5. Persentase kelulusan siswa SMP, SMA dan SMK belum mencapai 100%;
6. Masih terdapat sekolah yang belum terakreditasi;
7. Belum semua cabang olimpiade sains dapat bersaing secara nasional dan internasional;
8. Sebagian besar guru tidak berminat melakukan penelitian tindakan kelas;
9. Semua sekolah belum membuat rencana kerja jangka menengah 4 tahunan seperti dituangkan pada permendiknas no. 19 tahun 2007 tentang standar pengolahan;
10. Belum semua sekolah mampu melaksanakan proses belajar dan penilaian hasil belajar seperti yang dituangkan pada permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang standar proses, Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian;
11. Belum semua guru pada sekolah mampu mengoperasikan Komputer;
12. Belum terpenuhi standar pembiayaan untuk penyelenggaraan / pengelolaan sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
13. Masih ditemukan siswa mengulang, putus sekolah walaupun persentasenya kecil;
14. Belum tersedianya kartu belajar berdasarkan nomor induk siswa nasional sesuai dengan format Departemen Pendidikan Nasional;
15. Belum mencukupinya anggaran melalui APBD-2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk petugas operator jaringan pendidikan nasional yang ditetapkan oleh Depdiknas nomor 38 tahun 2008, tentang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Depdiknas;

16. Masih terdapat guru yang tidak menguasai standar profesionalisme;
17. Masih ada komite sekolah yang belum menerima sosialisasi tentang peran dan fungsi komite sekolah sesuai dengan Kepmendiknas no. 44 tahun 2003.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah "**Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)**", adapun misinya adalah (1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan; (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim); (3) Meningkatkan kualitas sdm melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK; (4) Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif; (5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis.

Dari lima misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor pendidikan terdapat pada misi ke-satu dan ke-tiga. Dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah : (1) Meningkatkan sarana pendidikan dasar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan; (2) Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.

dari dua tujuan di atas, adalah yang langsung mengerucut pada tujuan pembangunan sektor pendidikan dengan sasaran masing-masingnya yaitu : (a) tujuan satu sasaran kesatu adalah: Meningkatnya sarana pendidikan dasar (b) tujuan dua sasaran kesatu adalah : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat; (c) tujuan dua sasaran kedua adalah : Meningkatnya mutu tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas.

3.3 TELAHAH RENSTRA KEMDIKBUD DAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

sebagai langkah awal telaahan dapat dilakukan dengan berpijak pada penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik yang berdasarkan pada peraturan menteri perencanaan nasional / kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019.

Dalam sosialisasi rancangan tersebut, secara umum sasaran RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi;
2. Pendapatan perkapita;
3. Pemerataan pembangunan;
4. Pengentasan kemiskinan;
5. Keberlanjutan pembangunan;
6. Peningkatan daya saing;
7. inovasi teknologi;
8. SDM berkualitas;
9. Resiliensi berbasis swakarsa.

Dari sembilan point sasaran di atas, hanya satu yang relevan dengan pembangunan pada sektor pendidikan yaitu SDM berkualitas.

Sementara arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional adalah :

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment;
2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam;
3. Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal untuk pengembangan industri di luar Jawa;
4. Sinergi SDM, IPTEK dengan industri;
5. Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan;
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
7. Penguatan ketahanan pangan dan energi;
8. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional.

Seperti halnya sasaran umum RPJMN 2015-2019, dari 8 (delapan) point arah kebijakan, hanya satu yang menjadi rumusan pembangunan pada sektor pendidikan, yaitu **sinergi SDM, IPTEK dengan industri**, yang belum dapat informasikan secara terperinci.

Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut : (1.) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, yaitu menerapkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat; (2.) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis; (3.) Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif; (4.) Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, yaitu meningkatkan nilai tambah produk – produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan; (5.) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah; (6.) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

Dari Enam misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor pendidikan terdapat pada misi ke-dua. Dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan.

Dari tujuan di atas yang langsung mengerucut pada tujuan pembangunan sektor pendidikan dengan sasaran yaitu : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tujuan penataan ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 adalah “Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pusat pengembangan sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, industri, dan pertambangan guna mendorong tercapainya keseimbangan dan kemandirian wilayah yang berwawasan lingkungan”. Berdasarkan RTRW tersebut di atas, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi ; (a) Sistem Pusat Kegiatan; (b) Sistem Jaringan Prasarana Utama, (c) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, hal ini dapat terlihat dari (a) rencana sistem perkotaan; (b) rencana sistem perdesaan; (c) rencana jaringan transportasi; (d) rencana jaringan energi; (e) rencana jaringan telekomunikasi; (f) rencana jaringan sumber daya air; dan (g) rencana jaringan prasarana wilayah lainnya. RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya penambahan penduduk yang lebih tinggi yang berasal dari arus urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut di atas, yang antara lain adalah : (1) telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan pada tingkat kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir; (2) telaahan terhadap sasaran perencanaan pembangunan nasional periode tahun 2015-2019; (3) implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap layanan pendidikan; (4) permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah :

- 1) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS);
- 2) Penyebaran sarana pendidikan yang belum merata;
- 3) Masih tingginya jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak;
- 4) Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum seimbang;
- 5) Rendahnya mutu lulusan;
- 6) Belum meratanya jumlah tenaga pendidikan yang berkualitas (memiliki kompetensi);
- 7) Implementasi kurikulum 2013.

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka dinas pendidikan melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu :

1. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS);
2. Peningkatan akses pendidikan (sarana dan prasarana);
3. Peningkatan Angka Melek Huruf;
4. Bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu;
5. Peningkatan Jumlah Sekolah Unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, juga Visi dan Misi Bupati terpilih Periode 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, serta hasil telaahan terhadap isu-isu aktual yang berkembang, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan Visi sebagai berikut :

MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU DAN TERJANGKAU, MELALUI OPTIMALISASI LAYANAN

Dengan penetapan rumusan visi tersebut, maka diharapkan penyelenggaraan layanan pendidikan dapat membentuk dan mencetak sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing yang mampu mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam sekitarnya untuk dapat mewujudkan visi pemerintah daerah.

Adapun yang dimaksud dengan Pendidikan yang bermutu dan terjangkau antara lain adalah : (1). Terselenggaranya layanan pendidikan yang tersedia secara merata di seluruh pelosok Kabupaten Tanjung Jabung Timur; (2). Terselenggaranya layanan pendidikan yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; (3). Terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, baik dunia usaha maupun dunia industri; (4) terselenggaranya layanan pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara yang ada wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, dan gender; (5) terselenggaranya layanan pendidikan yang menjamin kepastian bagi seluruh warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dapat memperoleh layanan pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.

Untuk dapat mewujudkan visi sebagaimana rumusan di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan misi sebagai berikut:

Visi tersebut dijabarkan selanjutnya dalam Agenda pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka upaya dan prioritas bagaimana peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas dan akuntabilitas.

Misi Pertama : Menciptakan Pelayanan Pendidikan yang merata, berkeadilan, terjangkau dari aspek lokasi dan kesempatan

Dalam misi ini terkandung makna bahwa pelayanan pendidikan dapat diarahkan pada upaya yang dapat menjamin ketersediaan akses pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bagi semua kelompok masyarakat usia sekolah yang dapat dijangkau baik secara ekonomis maupun geografis.

Misi Kedua : Menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu sesuai Standar Operasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berorientasi pada Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Dalam misi ini terkandung makna bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan profesionalitas, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dan kelembagaan pendidikan yang mampu menyelenggarakan manajemen serta tata kelola pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Misi Ketiga : Memberikan Pelayanan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Dalam misi ini terkandung makna bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Formal dan Non Formal untuk menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Misi Keempat : Memberikan Pembinaan dan Pengembangan Kreatifitas Siswa

Dalam misi ini terkandung makna bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tanggung jawab memberikan pembinaan dan pengembangan kreatifitas siswa melalui kegiatan OSN, O2SN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing.

Misi Kelima : Meningkatkan Sistem Informasi Pendidikan dan Kerjasama Kelembagaan

Dalam misi ini terkandung makna bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tanggung jawab Meningkatkan Sistem Informasi Pendidikan dan Kerjasama Kelembagaan dengan melaksanakan pendataan bagi siswa, guru, sarana dan prasarana pendidikan serta melaksanakan kerjasama kelembagaan dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dalam bahasa Inggris disebut goal atau objektif. Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Bedanya dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi. Apabila misi disebut tugas, maka tujuan adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi.

Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada sektor pendidikan yang tertuang dalam renstra Dinas Pendidikan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas pendidikan mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi di atas. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pendidikan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang di miliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Rumusan tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2016-2021 yang sesuai dengan rumusan visi dan misi di atas adalah:

- Misi Pertama : Menciptakan Pelayanan Pendidikan yang merata, berkeadilan, terjangkau dari aspek lokasi, biaya dan kesempatan**
Yang tujuannya adalah memperluas jangkauan, pelayanan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan.
- Misi Kedua : Menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu sesuai Standar Operasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berorientasi pada Standar Nasional Pendidikan (SNP)**
Yang tujuannya adalah Meningkatkan Mutu Pendidikan.
- Misi Ketiga : Memberikan Pelayanan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal**
Yang tujuannya adalah Menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun.
- Misi Keempat : Memberikan Pembinaan dan Pengembangan Kreatifitas Siswa**
Yang tujuannya adalah Meningkatkan Prestasi Siswa SD dan SMP.
- Misi Kelima : Meningkatkan Sistem Informasi Pendidikan dan Kerjasama Kelembagaan**
Yang tujuannya adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Sistem Informasi Pendidikan;
 2. Mewujudkan Kerjasama Kelembagaan.

Sasaran Dinas Pendidikan dirumuskan berdasarkan tujuan dari masing-masing misi yang sudah dirumuskan. Adapun definisi sasaran itu sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan lembaga untuk mencapai sasarnya. Pendekatan pertama disebut pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, pimpinan tertinggi memberikan sasaran-sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi sub-tujuan (subgoals) yang lebih terperinci. Bawahannya itu kemudian menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga mencapai tingkat paling bawah. Pendekatan kedua disebut dengan management by objective atau MBO. Pada pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi tidak ditentukan oleh pimpinan puncak saja, tetapi juga oleh bawahan. Pimpinan dan bawahan bersama-sama membuat sasaran-sasaran yang ingin mereka capai. Dengan begini, seluruh karyawan akan merasa dihargai sehingga produktivitas mereka akan meningkat. Terkait dengan hal tersebut, kalau kita tarik benang merah dari dua pola pendekatan dalam penentuan sasaran di atas, yang dilakukan di Dinas Pendidikan untuk menentukan sasaran-sasaran yang ada dalam mencapai visi misi yang sudah dirumuskan, Dinas Pendidikan cenderung lebih menggunakan pola yang kedua, yaitu dalam penentuan sasaran-sasaran pendidikan, tidak hanya dilakukan oleh pucuk pimpinan, tapi juga ada peran aktif pejabat di bawahnya. Dan rumusan sasaran-sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan dengan tetap berpijak pada RPJMD periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Luasnya jangkauan pelayanan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan;
2. Meningkatnya Mutu Pendidikan;
3. Tuntasnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun;
4. Meningkatnya prestasi siswa SD dan SMP;
5. Terwujudnya sistem informasi pendidikan;
6. Terwujudnya kerjasama kelembagaan.

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel :
Rumusan Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja masing-masing Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
				1	2	3	4	5	6
1	Memperluas Jangkauan, Pelayanan dan Daya Tampung Semua Jalur dan Jenjang Pendidikan	Luasnya jangkauan pelayanan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan	1. Angka melek huruf	97,32	97,35	97,38	97,40	97,43	97,45
			2. Angka rata-rata lama sekolah	6,42	6,58	6,64	6,80	6,96	7,10
			3. Harapan Lama Sekolah	11,30	11,32	11,34	11,36	11,38	11,40
			4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	97,09	97,10	97,11	97,12	97,13	97,14
			5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	84,24	84,25	84,26	84,27	84,28	84,29
			6. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	55,91	57,71	59,51	60,31	62,11	63,91
			7. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	112,89	112,92	112,95	112,97	112,99	113,01
			8. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	92,28	92,29	92,31	92,32	92,34	92,36
			9. Angka Partisipasi Sekolah SD	104,41	104,42	104,44	104,45	104,47	104,48
			10. Angka Partisipasi Sekolah SMP	84,90	84,91	84,92	84,93	84,95	84,96
			11. Jumlah Peserta Didik dalam tiap rombel untuk SD tidak melebihi 32 siswa	89,23	89,24	89,25	89,27	89,28	89,30
			12. Jumlah Peserta Didik dalam tiap rombel untuk SMP tidak melebihi 36 siswa	96,63	97,37	98,11	98,85	99,59	100,00
			13. Rasio Ketersediaan Sekolah SD/Penduduk Usia Sekolah	98,34	98,38	98,42	98,47	99,01	99,05
			14. Rasio Guru/Murid SD Sederajat	61,14	61,19	61,21	61,24	61,27	61,31
			15. Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/Penduduk Usia Sekolah	67,52	67,53	67,56	67,57	67,59	67,60

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
				1	2	3	4	5	6
			16. Rasio Guru/Murid SMP Sederajat	59,44	59,46	59,47	59,49	59,50	59,52
			17. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,26	0,25	0,23	0,24	0,22	0,23
			18. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,34	0,32	0,31	0,30	0,28	0,28
			19. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,62	99,64	99,67	99,69	99,73	99,80
			20. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	97,07	97,09	97,13	97,14	97,17	97,20
			21. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97,04	97,05	97,07	97,08	97,11	97,13
			22. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	79,96	79,98	79,99	80,02	80,03	80,05
			23. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,83	90,84	90,85	90,86	90,87	90,88
			24. Persentase Rasio Ideal Rombel SD	89,23	89,24	89,25	89,27	89,28	89,30
			25. Persentase Rasio Ideal Rombel SMP	96,63	97,73	98,11	98,85	99,59	100
			26. Disetiap SMP Tersedia Ruang Labor IPA yang dilengkapi dengan meja kursi untuk 36 siswa dan minimal 1 set peralatan IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	15,55	17,77	19,99	22,21	24,43	26,65
			27. Disetiap SD tersedia satu ruang guru dan ruang kepala sekolah yang terpisah	21,57	22,06	22,55	29,04	29,53	30,02

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
				1	2	3	4	5	6
			28. Di setiap SMP tersedia satu ruang guru dan ruang kepala sekolah yang terpisah	42,22	44,44	46,66	48,88	51,00	53,22
			29. Meningkatnya kondisi baik ruang kelas SD	71,16	71,75	72,47	73,20	73,93	74,64
			30. Meningkatnya kondisi baik ruang kelas SMP	61,83	62,89	63,30	64,71	66,12	67,53
			31. Sekolah Rujukan SD	1	2	4	6	8	11
			32. Sekolah Rujukan SMP	0	1	2	3	4	5
			33. Sekolah Model SD	0	1	1	2	2	3
			34. Sekolah Model SMP	0	0	1	1	2	2
2	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1. Persentase sekolah yang telah menerapkan kurikulum	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00
			2. Persentase Sekolah Dasar yang ber Akreditasi minimal B	33,98	34,95	35,92	36,89	37,86	38,83
			3. Persentase Sekolah Menengah Pertama yang ber Akreditasi minimal B	35,56	40,00	44,44	48,89	53,33	57,78
3	Menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun	Tuntasnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun	1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket A setara SD	122	100	84	80	60	42
			2. Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket B setara SMP	561	125	100	75	74	50
			3. Memfasilitasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket C setara SMA	859	402	360	300	157	98

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
				1	2	3	4	5	6
4	Meningkatkan prestasi siswa SD dan SMP	Meningkatnya prestasi siswa SD dan SMP	Persentase terselenggaranya kegiatan OSN,OZSN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Mewujudkan sistem informasi pendidikan	Terwujudnya sistem informasi pendidikan	Tersedianya Data Siswa, Guru, Sarana dan Prasarana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Mewujudkan kerjasama kelembagaan	Terwujudnya kerjasama kelembagaan	Jumlah MOU dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan	0	0	1	0	1	0

4.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di atas, upaya yang dilakukan menggunakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran pertama, yaitu: "Luasnya jangkauan pelayanan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan", dicapai melalui **Strategi** "Perluasan jangkauan pelayanan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan". **Arah kebijakan** strategi tersebut adalah Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan.

Sasaran Kedua, yaitu: "Meningkatnya Mutu Pendidikan", dicapai melalui **Strategi** "Peningkatan Mutu Pendidikan". **Arah kebijakan** strategi tersebut adalah :

1. Penerapan Pendidikan berdasarkan Kurikulum;
2. Meningkatkan Akreditasi Sekolah Pendidikan Dasar.

Sasaran Ketiga, yaitu: "Tuntasnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun", dicapai melalui **Strategi** "Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun". **Arah kebijakan** strategi tersebut adalah Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Sasaran Keempat, yaitu: "Meningkatnya prestasi siswa SD dan SMP", dicapai melalui **Strategi** "Peningkatan prestasi siswa SD dan SMP". **Arah kebijakan** strategi tersebut adalah Melakukan kegiatan OSN, O2SN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing.

Sasaran Kelima, yaitu: "Terwujudnya sistem informasi pendidikan", dicapai melalui **Strategi** "Melaksanakan pemutakhiran data dan kegiatan pelatihan pendataan pangkalan Data Induk (Padati) bagi kelompok kerja Data (KK Data DIK)". **Arah kebijakan** strategi tersebut adalah Melaksanakan Pendataan Bagi Siswa, Guru, Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Sasaran Keenam, yaitu: "Terwujudnya kerjasama kelembagaan", dicapai melalui **Strategi** "Pelaksanaan kerjasama kelembagaan dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan". **Arah kebijakan** strategi tersebut adalah Melaksanakan kerjasama kelembagaan dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan.

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dengan visi dan misi Dinas Pendidikan dapat di lihat dalam tabel di bawah:

Tabel :
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Misi Pertama : Menciptakan Pelayanan Pendidikan yang Merata, Berkeadilan, Terjangkau dari Aspek Lokasi dan Kesempatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Memperluas Jangkauan, Pelayanan dan Daya Tampung Semua Jalur dan Jenjang Pendidikan	Luasnya jangkauan pelayanan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan	Perluasan jangkauan pelayanan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan	Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Misi Kedua : Menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Operasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berorientasi pada Standar Nasional Pendidikan (SNP)

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
2	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Peningkatan Mutu Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Pendidikan berdasarkan Kurikulum 2. Meningkatkan Akreditasi Sekolah Pendidikan Dasar

Misi Ketiga : Memberikan Pelayanan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
3	Menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun	Tuntasnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun	Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Misi Keempat : Memberikan Pembinaan dan Pengembangan Kreatifitas Siswa

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
4	Meningkatkan prestasi siswa SD dan SMP	Meningkatnya prestasi siswa SD dan SMP	Peningkatan prestasi siswa SD dan SMP	Melakukan kegiatan OSN,O2SN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing

Misi Kelima : Meningkatkan Sistem Informasi Pendidikan dan Kerjasama Kelembagaan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
5	Mewujudkan sistem informasi pendidikan	Terwujudnya sistem informasi pendidikan	Melaksanakan pemutakhiran data dan kegiatan pelatihan pendataan pangkalan Data Induk (Padati) bagi kelompok kerja Data (KK Data DIK)	Melaksanakan Pendataan Bagi Siswa, Guru, Sarana dan Prasarana
6	Mewujudkan kerjasama kelembagaan	Terwujudnya kerjasama kelembagaan	Pelaksanaan kerjasama kelembagaan dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan	Melaksanakan kerjasama kelembagaan dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut. Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga/ masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Penunjang. Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator sasaran.

Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Subsumber dan Kegiatan Esensial)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan (Rp.,)												Unit Kerja yang Penanggung Jawab	Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kumulatif Kinerja pada akhir periode Rencana RPJPD	
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			target	Rp.
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	2.281.020.747,34	100%	2.857.300.000,00	100%	2.478.500.000,00	100%	3.033.700.000,00	100%	3.187.900.000,00	100%	3.342.100.000,00	100%	9.342.100.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			1. Penyediaan Jasa Swast Menyurat	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	5.100.000,00	100%	5.300.000,00	100%	5.500.000,00	100%	5.700.000,00	100%	5.900.000,00	100%	6.100.000,00	100%	6.100.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			2. Penyediaan Jasa Kebersihan, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlengkapinya Kebersihan Kantor	100%	100%	72.000.000,00	100%	73.000.000,00	100%	74.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	76.000.000,00	100%	77.000.000,00	100%	77.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Keuangan	100%	100%	339.000.000,00	100%	342.000.000,00	100%	345.000.000,00	100%	348.000.000,00	100%	351.000.000,00	100%	354.000.000,00	100%	354.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlengkapinya Lingkungan Kantor yang Bersih	100%	100%	10.000.000,00	100%	11.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	13.000.000,00	100%	14.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlengkapinya Perawatan Kerja Kantor	100%	100%	5.600.000,00	100%	6.600.000,00	100%	7.600.000,00	100%	8.600.000,00	100%	9.600.000,00	100%	10.600.000,00	100%	10.600.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			6. Penyediaan Abi Tulis Kantor	Terlengkapinya Abi Tulis Kantor	100%	100%	109.000.000,00	100%	110.000.000,00	100%	111.000.000,00	100%	112.000.000,00	100%	113.000.000,00	100%	113.000.000,00	100%	113.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			7. Penyediaan Barang Bekas dan Penggantian	Terlengkapinya Barang Bekas dan Penggantian	100%	100%	123.000.000,00	100%	124.000.000,00	100%	125.000.000,00	100%	126.000.000,00	100%	127.000.000,00	100%	128.000.000,00	100%	128.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			8. Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Lingkungan Kantor	Terlengkapinya Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Lingkungan Kantor	100%	100%	37.000.000,00	100%	38.000.000,00	100%	39.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	41.000.000,00	100%	42.000.000,00	100%	42.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			9. Penyediaan Perbaikan dan Penggantian Kantor	Terlengkapinya Perbaikan dan Penggantian Kantor	100%	100%	265.000.000,00	100%	270.000.000,00	100%	275.000.000,00	100%	280.000.000,00	100%	285.000.000,00	100%	290.000.000,00	100%	290.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			10. Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan/Instalasi	Terlengkapinya Bahan Baku dan Perawatan Peralatan/Instalasi	100%	100%	10.000.000,00	100%	11.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	13.000.000,00	100%	14.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			11. Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlengkapinya Makanan dan Minuman	100%	100%	32.000.000,00	100%	33.000.000,00	100%	34.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	36.000.000,00	100%	37.000.000,00	100%	37.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			12. Biaya cetak koran/diisi dan koran/diisi ke Luar Daerah	Terlengkapinya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	100%	67.000.000,00	100%	68.000.000,00	100%	69.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%	71.000.000,00	100%	72.000.000,00	100%	72.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			13. Peralatan File Hologram/Man	Terlengkapinya Peralatan File Hologram/Man	100%	100%	110.000.000,00	100%	109.000.000,00	100%	108.000.000,00	100%	107.000.000,00	100%	106.000.000,00	100%	105.000.000,00	100%	105.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			14. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Barat	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan	100%	100%	102.266.250,00	100%	110.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			15. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Timur	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan	100%	100%	110.210.250,00	100%	120.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	159.000.000,00	100%	160.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			16. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan	100%	100%	121.810.250,00	100%	135.000.000,00	100%	145.000.000,00	100%	155.000.000,00	100%	165.000.000,00	100%	175.000.000,00	100%	175.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			17. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara Ulu	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan	100%	100%	110.110.250,00	100%	120.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%	160.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			18. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Otongul	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan	100%	100%	96.250.497,34	100%	110.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			19. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Sialiti Jambi	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan	100%	100%	84.650.250,00	100%	110.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			20. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Dandang	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan	100%	100%	86.010.250,00	100%	110.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			21. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Barabak	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan	100%	100%	14.050.250,00	100%	135.000.000,00	100%	145.000.000,00	100%	155.000.000,00	100%	165.000.000,00	100%	175.000.000,00	100%	175.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			22. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Rantau Ressai	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan	100%	100%	93.310.250,00	100%	120.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%	160.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur
			23. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Nyah Panjang	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan	100%	100%	95.710.250,00	100%	120.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%	160.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tanjung Timur

Tajuan	Struktur	Indikator, Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Kegiatan (Output))	Data Capaian pada Tahun Aneka Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan (Rp.)										Kendala Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD		Unit Kerja SKPD yang bersangkutan	Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
			24	Pengembangan Bonyo Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Sada	100%	100%	104.544.000,00	100%	135.000.000,00	100%	145.000.000,00	100%	155.000.000,00	100%	165.000.000,00	100%	175.000.000,00	100%	175.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
Tersedianya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		100%	100%	79.370.000,00	100%	1.306.000.000,00	100%	947.000.000,00	100%	868.000.000,00	100%	829.000.000,00	100%	990.000.000,00	100%	990.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
			1	Pengadaan Kandang	100%	100%	308.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%	180.000.000,00	100%	190.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
			2	Pembelahan Rukun/Berkala Gedung Kantor	100%	100%	40.500.000,00	100%	60.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%	80.000.000,00	100%	90.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
			3	Pembelahan Rukun/Dikals Kandang Dinas/Operasional	100%	100%	107.570.000,00	100%	2.800.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	260.000.000,00	100%	270.000.000,00	100%	280.000.000,00	100%	280.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
			4	Pembelahan Rukun/Dikals Kandang Gedung Kantor	100%	100%	5.000.000,00	100%	6.000.000,00	100%	7.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	9.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
			5	Rehabilitasi Gedung/Dit Gedung Kantor	100%	100%	50.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	110.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	140.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
Tersedianya Pemenuhan Dinas Aparatur	Aparatur Dinas Tersedia	Pemenuhan Pemenuhan Dinas Aparatur	3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		100%	100%	36.710.568,04	100%	240.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%	80.000.000,00	100%	80.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
			1	Pengawasan/Patikan Dinas Bersisa Peninggiannya	100%	100%	36.710.568,04	100%	240.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%	80.000.000,00	100%	80.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
Merupakan Aparatur Pendidik, Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Profesional	Tersedianya Aparatur Pendidik, Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Profesional	Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pendidik, Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Profesional	4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS GURUBERDAYA ALMAYATUR		100%	100%	225.000.000,00	100%	240.000.000,00	100%	255.000.000,00	100%	270.000.000,00	100%	285.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
			1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	100%	15.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
Merupakan aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan profesional sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan lebih baik dan berkualitas	Aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan profesional sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan lebih baik dan berkualitas	Kompetensi Pegawai Dinas Pendidikan baik pejabat struktural, fungsional maupun staf pelaksana yang dimiliki akan lebih baik dan berkualitas	5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBAHAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		100%	100%	70.550.000,00	100%	76.000.000,00	100%	82.000.000,00	100%	88.000.000,00	100%	94.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
			1	Peningkatan Laporan Kinerja Atas Kapasitas Pemecahan	100%	100%	15.500.000,00	100%	16.000.000,00	100%	17.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	19.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
Merupakan aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan profesional sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan lebih baik dan berkualitas	Aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan profesional sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan lebih baik dan berkualitas	Kompetensi Pegawai Dinas Pendidikan baik pejabat struktural, fungsional maupun staf pelaksana yang dimiliki akan lebih baik dan berkualitas	6 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		100%	100%	42.800.000,00	100%	21.000.000,00	100%	22.000.000,00	100%	23.000.000,00	100%	24.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
			1	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	100%	100%	22.000.000,00	100%	21.000.000,00	100%	22.000.000,00	100%	23.000.000,00	100%	24.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
Tersedianya Pemenuhan Sarana dan Prasarana PAUD (TK)	Pemenuhan Sarana dan Prasarana PAUD (TK)	Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD (TK)	7 PROGRAM PENINGKATAN ANAK USA DIA		100%	100%	5.555.266.738,25	100%	3.807.810.000,00	100%	3.850.871.000,00	100%	4.044.968.000,00	100%	4.239.953.000,00	100%	4.235.949.000,00	100%	4.235.949.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
			1	Pembangunan Sarana dan Prasarana TK	0	0	0	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
			2	Rehabilitasi Sarana/Prasarana TK	100%	100%	60.000.000,00	100%	80.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
			3	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	100%	100%	75.100.000,00	100%	87.040.000,00	100%	90.871.000,00	100%	98.550.000,00	100%	109.953.000,00	100%	126.942.000,00	100%	126.942.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
			4	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	100%	100%	4.521.158.238,25	100%	7.200.000.000,00	100%	7.200.000.000,00	100%	7.200.000.000,00	100%	7.200.000.000,00	100%	7.200.000.000,00	100%	7.200.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
			5	Peningkatan Kualitas dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	100%	100%	180.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	220.000.000,00	100%	230.000.000,00	100%	240.000.000,00	100%	240.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
			6	Pelaksanaan dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	100%	100%	53.750.500,00	100%	105.000.000,00	100%	110.000.000,00	100%	115.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	125.000.000,00	100%	125.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur
7	Pembangunan Gedung Baru	100%	100%	125.200.000,00	100%	170.000.000,00	100%	230.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timur			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan (Rp.)												Realisasi Kinerja pada akhir periode Rencana SDMP		Unit Kerja yang bertanggung jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		target	realisasi		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			8. Insentif Operasional PAUD (BOP)	Terseruhnya Biaya Operasional PAUD	100%	0	310.000.000,00	100%	320.000.000,00	100%	330.000.000,00	100%	340.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	360.000.000,00	100%	360.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timor
			9. UJRH Guru PAUD berjenjang Tingkat Dasar	Tertibkannya UJRH Guru PAUD	100%	0	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	170.000.000,00	100%	180.000.000,00	100%	190.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timor
			10. Pendidikan Abdi Paraga Pendidikan	Tertibkannya Pendidikan Abdi Paraga Pendidikan	0	0	0	0	0	0	100.000.000,00	1	50.000.000,00	2	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timor
			11. Pembangunan Fasilitas Lingkungan Upacara dan Fasilitas Parkir	Tersedianya Fasilitas Upacara dan Fasilitas Parkir	0	0	0	0	0	0	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timor
			8. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEBELAH TAHUN		100%	100%	20.850.195.573,69	100%	44.851.611.043,32	100%	63.428.247.646,63	100%	61.691.506.190,63	100%	47.613.916.526,16	100%	41.180.792.107,69	100%	41.180.792.107,69		
				Angka Rata-rata Lulus Sekolah	6,26	6,47		6,53		6,64		6,80		6,96		7,10		7,10			
				Harapan Lama Sekolah	11,28	11,30		11,32		11,34		11,36		11,38		11,40		11,40			
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	97,08	97,09		97,10		97,11		97,12		97,13		97,14		97,14			
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	84,23	84,24		84,25		84,26		84,27		84,28		84,29		84,29			
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PIMID	54,11	54,11		54,11		54,11		54,11		54,11		54,11		54,11			
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	112,87	112,89		112,92		112,95		112,97		112,99		113,01		113,01			
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	92,27	92,28		92,29		92,31		92,32		92,34		92,36		92,36			
				Angka Partisipasi Sekolah SD	104,30	104,41		104,42		104,44		104,45		104,47		104,48		104,48			
				Angka Partisipasi Sekolah SMP	84,88	84,90		84,91		84,92		84,93		84,95		84,96		84,96			
				Jumlah Peserta Didik dalam Rangka Belajar di SD lebih dari 30 juta	89,22	89,23		89,24		89,25		89,27		89,28		89,30		89,30			
				Jumlah Peserta Didik dalam Rangka Belajar di SMP lebih dari 30 juta	95,96	96,03		97,32		98,11		99,85		99,99		100,00		100,00			
				Rasio Ketercapaian Sekolah SD Terpadu Usia Sekolah	98,30	98,34		98,38		98,42		98,47		99,01		99,05		99,05			
				Rasio Ketercapaian SD Sederajat	61,11	61,14		61,19		61,21		61,24		61,27		61,31		61,31			
				Rasio Ketercapaian Sekolah SMP Terpadu Usia Sekolah	67,51	67,52		67,53		67,56		67,57		67,59		67,60		67,60			
				Rasio Guru/Murid SMP Sederajat	58,43	58,44		58,46		58,47		58,48		58,50		58,52		58,52			
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,27	0,26		0,25		0,23		0,24		0,22		0,23		0,23			
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,35	0,34		0,32		0,31		0,29		0,28		0,28		0,28			
				Angka Ketidakhadiran (AK) SD/MI	53,60	54,65		59,54		66,67		69,88		79,73		79,80		79,80			
				Angka Ketidakhadiran (AK) SMP/MTs	95,05	97,07		97,09		97,13		97,14		97,17		97,20		97,20			
				Angka Ketidakhadiran (AK) dari SD/MI ke SMP/MTs	97,02	97,04		97,05		97,08		97,08		97,08		97,11		97,13			
				Angka Ketidakhadiran (AK) dari SMP/MTs ke SD/MI	79,05	79,56		79,85		79,98		80,02		80,03		80,05		80,05			
				Survei yang melibatkan Kepala Sekolah (SKS)	30,82	30,63		30,44		30,85		30,80		30,87		30,88		30,88			
				Partisipasi Masyarakat di Sekolah SD	89,22	89,23		89,24		89,25		89,27		89,28		89,30		89,30			
				Partisipasi Masyarakat di Sekolah SMP	51,56	51,63		51,73		51,11		51,85		52,56		53,00		53,00			
				Ditaman SMP Terpadu Ruang Labor IPA yang dilengkapi dengan media	13,33	15,55		17,27		19,09		22,21		24,43		26,65		26,65			
				Ditaman SD Terpadu ada ruang guru dan ruang kepala sekolah yang	21,08	21,57		22,06		22,55		23,04		23,53		24,02		24,02			
				Di setiap SMP terpadu ada ruang guru dan ruang kepala sekolah yang	40	42,22		44,44		46,66		48,88		51,10		53,32		53,32			
				Meningkatnya kondisi baik ruang	60,8	71,16		71,75		72,47		73,20		73,93		74,66		74,66			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Monev Program (Subsidi) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Ajaran Perencanaan 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan (Rp.)										Rencana Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020					target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
			8. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (BOS)	Tertindakannya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (BOS)	100%	100%	140.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%	170.000.000,00	100%	180.000.000,00	100%	190.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timor	
			7. Okupade Guru SD, SMP dan SMA	Peningkatan kuantitas Guru SD dan SMA	0	0	0	0	500.000.000,00	100%	510.000.000,00	100%	520.000.000,00	100%	530.000.000,00	100%	540.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timor	
			6. Ditisi Pengalihan Kompetensi Guru dan Pegawai Sekolah	Tertindakannya Pengalihan yang Demensi	0	0	0	0	500.000.000,00	100%	510.000.000,00	100%	520.000.000,00	100%	530.000.000,00	100%	540.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timor	
			13. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN		100%	100%	670.000.000,00	100%	1.195.000.000,00	100%	1.710.000.000,00	100%	1.335.000.000,00	100%	1.350.000.000,00	100%	1.445.000.000,00			
			1. Pelaksanaan Kerjasama secara Ketenagagaan di Bidang Pendidikan	Tertindakannya Kerjasama secara Ketenagagaan di Bidang Pendidikan	0	0	0	0	250.000.000,00	100%	260.000.000,00	100%	270.000.000,00	100%	280.000.000,00	100%	290.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timor	
			2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan serta Gender	Tertindakannya Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan serta Gender	0	0	0	0	50.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%	80.000.000,00	100%	90.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timor	
			3. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Tertindakannya Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	100%	100%	400.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	550.000.000,00	100%	560.000.000,00	100%	570.000.000,00	100%	580.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timor	
			4. Penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Timah Imiting Berbagai Isi tentang Pendidikan	Tertindakannya Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Timah Imiting Berbagai Isi tentang Pendidikan	0	0	0	0	100.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	160.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timor	
			5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tertindakannya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	60.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	80.000.000,00	100%	85.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timor	
			6. Penyusunan Perencanaan dan Program	Tertindakannya Penyusunan Perencanaan dan Program SKPD Dinas Pendidikan	100%	100%	410.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	590.000.000,00	100%	680.000.000,00	100%	770.000.000,00	100%	860.000.000,00	Dinas Pendidikan	Kab. Tangah Timor	
			Jumlah				41.390.247.226,00		61.164.321.043,32		61.233.618.686,63		65.284.158.190,03		61.572.898.556,16		66.558.841.107,69			

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPKP adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting. untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor pendidikan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: pertama Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Kedua Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada tabel bawah ini adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel
Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Periode 2016 - 2021

NO	INDIKATOR	Kondisi Awal RPJMD	Target						Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka melek huruf	97,30	97,32	97,35	97,38	97,40	97,43	97,45	97,45
2	Angka rata-rata lama sekolah	6,26	6,42	6,58	6,64	6,80	6,96	7,10	7,10
3	Harapan Lama Sekolah	11,28	11,30	11,32	11,34	11,36	11,38	11,40	11,40
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	97,08	97,09	97,10	97,11	97,12	97,13	97,21	97,14
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	84,23	84,24	84,25	84,26	84,27	84,28	84,29	84,29
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	54,11	55,91	57,71	59,51	60,31	62,11	63,91	63,91
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	112,87	112,89	112,92	112,95	112,97	112,99	113,01	113,01
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	92,27	92,28	92,29	92,31	92,32	92,34	92,36	92,36
9	Angka Partisipasi Sekolah SD	104,39	104,41	104,42	104,44	104,45	104,47	104,48	104,48
10	Angka Partisipasi Sekolah SMP	84,89	84,90	84,91	84,92	84,93	84,95	84,96	84,96
11	Jumlah Peserta Didik dalam tiap rombel untuk SD tidak melebihi 32 siswa	89,22	89,23	89,24	89,25	89,27	89,28	89,30	89,30
12	Jumlah Peserta Didik dalam tiap rombel untuk SMP tidak melebihi 36 siswa	95,56	96,63	97,37	98,11	98,85	99,59	100,00	100,00
13	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/Penduduk Usia Sekolah	98,30	98,34	98,38	98,42	98,47	99,01	99,05	99,05
14	Rasio Guru/Murid SD Sederajat	61,11	61,14	61,19	61,21	61,24	61,27	61,31	61,31
15	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/Penduduk Usia Sekolah	67,51	67,52	67,53	67,56	67,57	67,59	67,60	67,60
16	Rasio Guru/Murid SMP Sederajat	59,43	59,44	59,46	59,47	59,49	59,50	59,52	59,52
17	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,27	0,26	0,25	0,23	0,24	0,22	0,23	0,23
18	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,35	0,34	0,32	0,31	0,30	0,28	0,28	0,28
19	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,60	99,62	99,64	99,67	99,69	99,73	99,80	99,80
20	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	96,05	97,07	97,09	97,13	97,14	97,17	97,20	97,20

NO	INDIKATOR	Kondisi Awal RPJMD	Target						Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
21	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97,02	97,04	97,05	97,07	97,08	97,11	97,13	97,13
22	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	79,95	79,96	79,98	79,99	80,02	80,03	80,05	80,05
23	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,82	90,83	90,84	90,85	90,86	90,87	90,88	90,88
24	Persentase Rasio Ideal Rombel SD	89,22	89,23	89,24	89,25	89,27	89,28	89,30	89,30
25	Persentase Rasio Ideal Rombel SMP	95,56	96,63	97,73	98,11	98,85	99,59	100,00	100,00
26	Disetiap SMP Tersedia Ruang Labor IPA yang dilengkapi dengan meja kursi untuk 36 siswa dan minimal 1 set peralatan IPA untuk demontrasi dan experimen peserta didik	13,33	15,55	17,77	19,99	22,21	24,43	26,65	26,65
27	Disetiap SD tersedia satu ruang guru dan ruang kepala sekolah yang terpisah	21,08	21,57	22,06	22,55	29,04	29,53	30,02	30,02
28	Di setiap SMP tersedia satu ruang guru dan ruang kepala sekolah yang terpisah	40,00	42,22	44,44	46,66	48,88	51,00	53,22	53,22
29	Meningkatnya kondisi baik ruang kelas SD	60,8	71,16	71,75	72,47	73,2	73,93	74,64	74,64
30	Meningkatnya kondisi baik ruang kelas SMP	61,13	61,83	62,89	63,3	64,71	66,12	67,53	67,53
31	Sekolah Rujukan SD	0	1	2	4	6	8	11	11
32	Sekolah Rujukan SMP	0	0	1	2	3	4	5	5
33	Sekolah Model SD	0	0	1	1	2	2	3	3
34	Sekolah Model SD	0	0	0	1	1	2	2	2
35	Persentase sekolah yang telah menerapkan kurikulum	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36	Persentase Sekolah Dasar yang ber Akreditasi minimal B	33,01	33,98	34,95	35,92	36,89	37,86	38,83	38,83
37	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang ber Akreditasi minimal B	33,11	35,56	40,00	44,44	48,89	53,33	57,78	57,78
38	Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket A setara SD	488	122	100	84	80	60	42	488

NO	INDIKATOR	Kondisi Awal RPJMD	Target						Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
39	Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket B setara SMP	985	561	125	100	75	74	50	985
40	Menfasilitasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket C setara SMA	2176	859	402	360	300	157	98	2176
41	Persentase terselenggaranya kegiatan OSN, O2SN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	Tersedianya Data Siswa, Guru, Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	Jumlah MOU dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan	3	0	0	1	0	1	0	5

BAB VII

PENUTUP

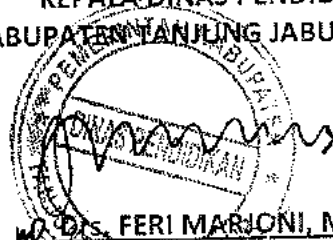
Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Muara Sabak, 15 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNGPINANG JABUNG TIMUR



Dis. FERI MARJONI, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640307 198803 1 009